



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



INDUSTRIALISASI
MTB GEMILANG

Perindustrian*

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB
TAHUN 2024**

**DINAS PERINDUSTRIAN
Provinsi Nusa Tenggara Barat
TAHUN 2024**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip "*Good Governance*" yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran selama satu periode tertentu. Laporan ini mencerminkan sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan strategis. Sejalan dengan itu, penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian tahun 2024 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala Dinas Perindustrian kepada semua pihak yang berkepentingan.

Dinas Perindustrian dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 mengawal 3 tujuan yaitu :

1. Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri
2. Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintah daerah.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diukur dari pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 yaitu :

1. Persentase Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri
2. Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan
3. Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)

Perumusan tujuan dan sasaran akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai akuntabilitas berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, ketentuan dan kesehatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP) Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan industri yang diindikasikan dengan pertumbuhan industri dimana indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri
2. Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan
3. Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)

Disadari bahwa, LAKIP/LKjIP ini masih jauh dari kata sempurna, namun diharapkan dapat memenuhi standar pelaporan yaitu sebagai bahan evaluasi dan informasi. Laporan ini kedepan merupakan bahan awal dalam penyusunan kebijakan pembangunan di bidang industri di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan sumbangsih ide dan pikiran dalam penyusunan LAKIP/LKjIP ini disampaikan terimakasih.

Mataram, 2025

Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Nusa Tenggara Barat

NURYANTI,SE.,ME

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197601041999022002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri di Provinsi NTB masih menjadi program unggulan yang diyakini dapat menurunkan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Hadirnya sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah pada ekonomi regional yang tergambar pada produk domestik regional bruto (PDRB). Industri yang dimaksud disini adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian. Hadirnya sektor industri pengolahan yang kokoh akan memberi kepastian pemasaran dari berbagai output sektor hulu sekaligus menjaga stabilitas harga produk sektor hulu tersebut. Dengan kata lain bahwa barang baku yang ada harus terlebih dahulu memberikan nilai tambah sebelum dipasarkan. Industrialisasi salah satunya bermakna meningkatkan peran sektor industri pengolahan sehingga berperan sebagai sektor utama dalam ekonomi. Dengan kuatnya keterkaitan sektor industri pengolahan dengan sektor ekonomi lainnya, diharapkan kemajuan sektor industri pengolahan mampu merangsang pertumbuhan sektor ekonomi lainnya baik sektor hilir maupun sektor hulu.

Peluang industrialisasi di NTB begitu besar sehingga harus mampu dimanfaatkan oleh masyarakat NTB guna memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Bahan baku belum banyak dimanfaatkan dalam skala industri sehingga perlu sentuhan sumberdaya manusia industri yang kreatif. Hal tersebut merupakan tantangan yang sangat besar bagi Industri Kecil dan Menengah di bawah binaan Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk semakin menunjukkan posisinya, baik dalam pengolahan pangan, sandang, maupun kerajinan, terlebih lagi di NTB pada akhir-akhir ini sering dilaksanakan event internasional diantaranya yaitu diselenggarakannya event Moto GP yang tentunya bisa mendatangkan para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi sektor yang strategis. Pada tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi NTB. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ditemukan bahwa beberapa indikator yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dinilai belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD 2019-2023. Menindaklanjuti catatan tersebut, Dinas Perindustrian melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menyesuaikan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) RPJMD Tahun 2019–2023. Penyesuaian tersebut juga mencakup pengintegrasian ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 guna meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

Dinas Perindustrian dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 mengawali 3 tujuan yaitu :

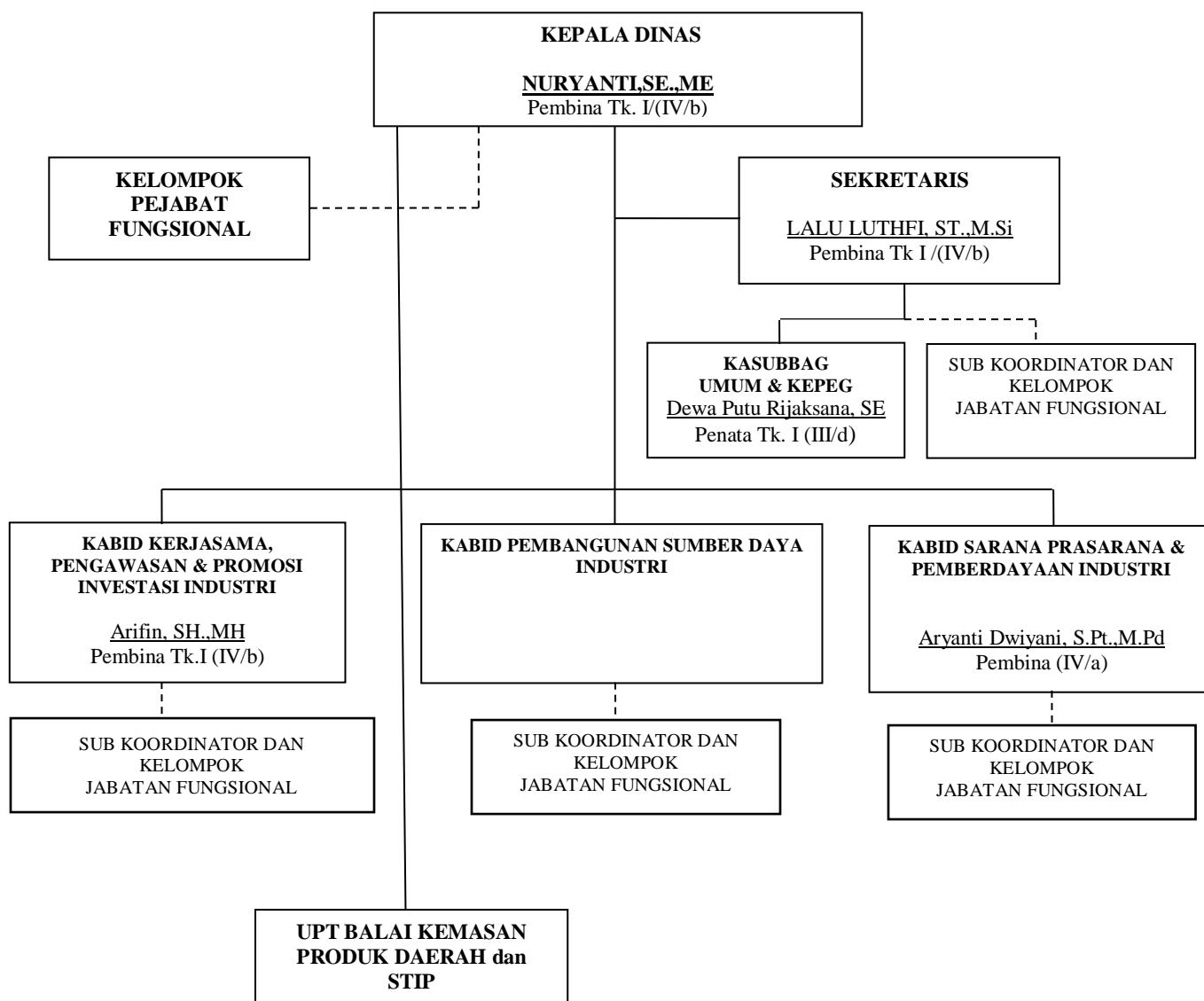
1. Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri
2. Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintah daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai akuntabilitas berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan.

B. Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dibantu dengan Sekretariat, Bidang-Bidang,

dan Unit Pelaksana Teknis. Struktur organisasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dinas Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Ringkasan serta Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Kepala Dinas

Ringkasan Tugas:

Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Balai Kemasan Produk Daerah (BKPD) dan Kesekretariatan.

Rincian Tugas:

- a. Merumuskan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Balai Kemasan Produk Daerah (BKPD) dan Kesekretariatan;
- b. Merumuskan dan menetapkan bahan/materi kebijakan rencana pembangunan Industri, (RPIP),
- c. Merumuskan dan menetapkan bahan/materi kebijakan teknis dibidang penguatan struktur Industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa Industri, standardisasi Industri, teknologi Industri, pengembangan Industri strategis dan Industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembagunan Industri, ketahanan Industri dan kerjasama, serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- d. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan struktur Industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi Industri dan jasa Industri, standardisasi, teknologi Industri, pengembangan Industri strategis dan Industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri, ketahanan Industri dan kerjasama, serta peningkatan penggunaan Industri produk dalam negeri;
- e. Merumuskan dan malaksanakan bahan/materi kebijakan penelitian dan pengembangan dibidang perindustrian;
- f. Merumuskan dan menyelenggarakan bahan/materi kebijakan administrasi, pembinaan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang/asset daerah sesuai dengan data dan ketentua Perundang-undangan;

- g. Merumuskan dan mengidentifikasi bahan/materi kebijakan permasalahan, menganalisa dan mengevaluasi serta merumuskan alternatif pemecahan dibidang perindustrian;
- h. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas;
- i. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Rincian Fungsi:

- a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/materi kebijakan strategis di bidang Perindustrian;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan strategis dibidang Perindustrian;
- c. Pelaksanaan koordinasi,
- d. fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, dibidang Perindustrian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

2. Sekretariat

a. Sekretaris:

Ringkasan Tugas:

Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas

- a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan dan Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian;

- b. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kebijakan usulan rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) kegiatan dinas;
- c. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) kegiatan kesekretariatan;
- d. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kebijakan pembinaan umum perencanaan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan asset/barang daerah, serta urusan rumah tangga dinas;
- e. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- f. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas;
- g. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan;
- h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Rincian Fungsi

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Kesekretariatan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, dibidang Kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi,

monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian, system manajemen dan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan,dokumentasi, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga dinas;
- c. Menyiapkan bahan/materi kebijakan pembinaan, pengelolaan dan teknis administrasi Kepegawaian dan Umum;
- d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan kebijakan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ,LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum dan Kepegawaian;
- f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

3. Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri

a. Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian, Promosi Investasi Industri .

Rincian Tugas:

- a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian, Promosi Investasi Industri;

- b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama;
- c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi
- e. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri;
- f. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Rincian Fungsi

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Industri Agro;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Industri Agro;
- c. Pelaksanaan koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan di bidang Industri Agro; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi;
- b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi;
- d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. Menyusun dan melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- f. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- g. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri;
- h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Rincian Fungsi

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

5. Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Kepala Bidang

Ringkasan Tugas:

Menyusun bahan/materi kebijakan, program, kegiatan dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri, Pengelolaan Data dan Informasi Industri.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah, Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri, Pengelolaan Data dan Informasi Industri;
- b. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Provinsidan Lintas Kabupaten/Kota;
- c. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah

Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri,dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;

- d. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota;
- e. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- f. Menyusun dan melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di provinsi;
- g. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Rincian Fungsi

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan administrasidinas, pembinaan, dibidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

6. Balai Kemasan Produk Daerah

Tugas:

Melaksanakan tugas teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis dinas sesuai dengan bidangnya; dan
- c. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

Susunan Organisasi Balai Kemasan Produk Daerah, terdiri dari:

a. Kepala

Ringkasan Tugas:

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Kemasan Produk Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- a. Pelaksanaan operasional dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat;
- b. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Balai; dan
- c. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Ringkasan Tugas:

Melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga, pengelolaan informasi dan dokumentasi serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Kemasan Produk Daerah.

c. Kepala Seksi Diklat dan Promosi

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan di bidang pengolahan industri makanan, minuman, dan kerajinan

d. Kepala Seksi Teknis Kemasan

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan pelayanan teknis di bidang desain dan kemasan produk unggulan daerah

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Ringkasan Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala UPTD sesuai dengan bidang keahlian, yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD, dengan jumlah tenaga dalam jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB per tanggal 31 Desember 2022 memiliki Aparatur Sipil Negara ASN sebanyak 57 orang. ASN tersebut tersebar pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Kemasan Produk Daerah dan Dinas Perindustrian sendiri sebagai induk dari kedua UPTD tersebut, adapun komposisi ASN Dinas Perindustrian sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja Dinas	Status Kepegawaian		Jenis Kelamin		Pendidikan						Golongan				
		PNS	PTT	L	P	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	S2	I	II	III	IV
1	Dinas Perindustrian	50	0	29	21	0	0	4	1	37	7	1	0	0	44	6

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023

Dalam era industrialisasi 4.0 dan Sustainable Development Goals (SDGs) kesenjangan antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi isu yang hangat untuk diangkat kepublik. Dalam komposisi kepegawaian Dinas Perindustrian kesetaraan Gender sudah

menjadi hal terpenuhi dimana komposisi jumlah perempuan hampir sama dengan jumlah laki-laki. Adapun rincian komposisi sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Perindustrian sebagai berikut :

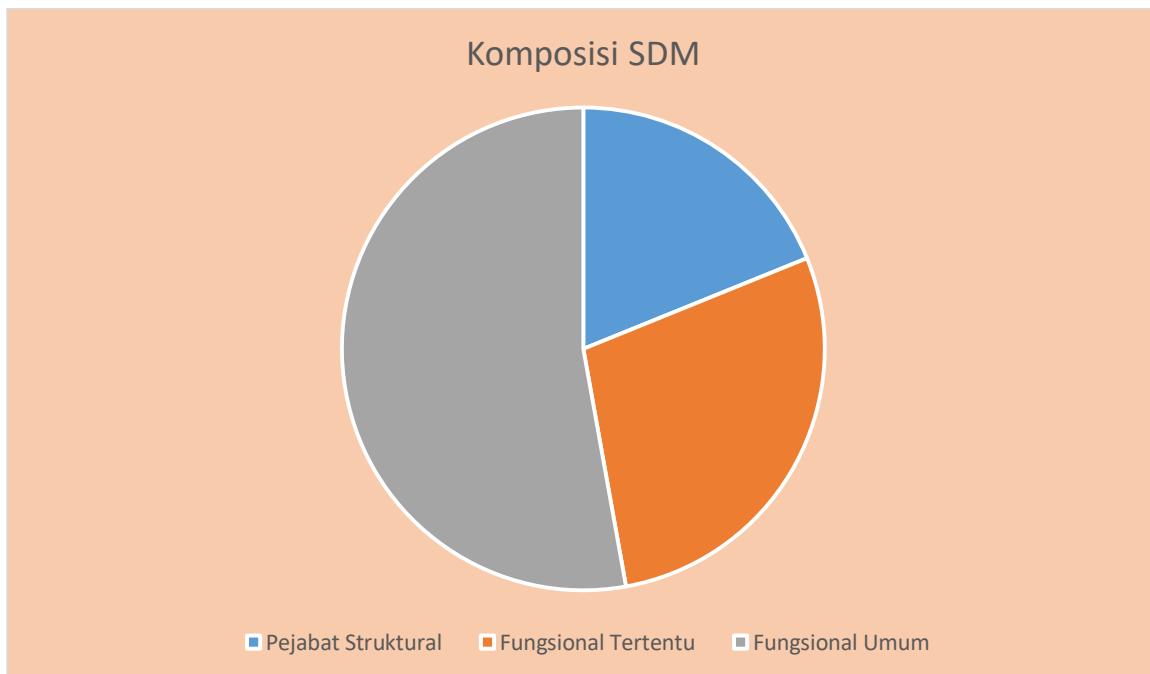
Tabel 1.2
Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Jumlah (Orang)	Pria	Persentase (%)	Wanita	Persentase (%)
Pejabat Struktural	9	6		3	
Fungsional Tertentu	15	10		5	
Fungsional Umum	26	13		13	
Jumlah	50	29	58	21	42

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2024

Jabatan struktural menjadi ujung pembangunan didalam pemerintahan. Jabatan struktural tentunya didukung oleh jabatan struktural umum dan diperkuat dengan jabtan struktural tertentu. Adapun komposisi jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum pada Dinas Perindustrian dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Gambar 1.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

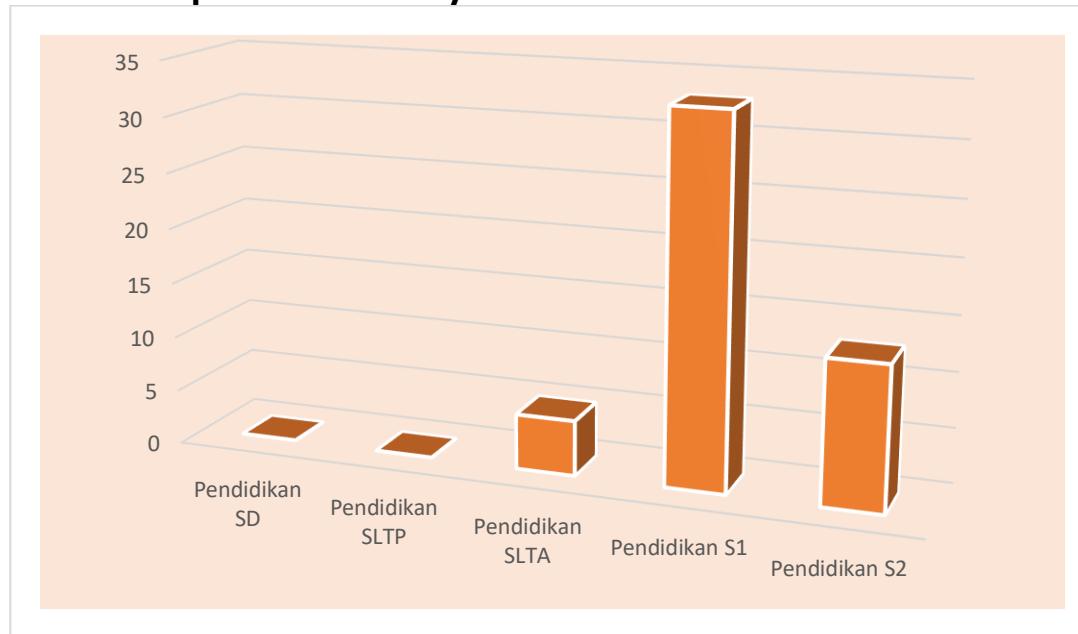


Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2024

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas suatu hasil pekerjaan sebuah lembaga. Untuk itu tingkat pendidikan sumberdaya manusia selalu diutamakan

untuk menunjang pembangunan daerah. Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian Provinsi NTB berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

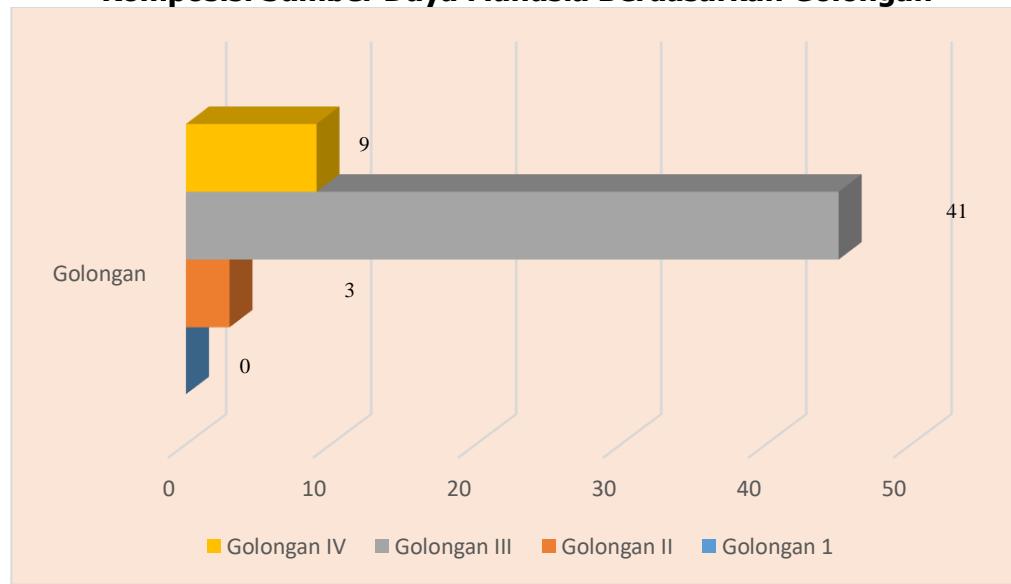
Gambar 1.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023

Komposisi Sumber daya manusia Dinas Perindustrian Provinsi NTB berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 1.4
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 21.249.241.143,33

Daftar sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2020-2023

NO.	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	TOTAL NILAI (RP)
1.	Station Wagon	2020	1	396.000.000
2.	Lemari Kayu	2020	1	13.000.000
3.	Lemari Kayu	2022	1	15.351.145
4.	Lemari Kayu	2022	1	17.624.580
5.	Lemari Kayu	2022	1	19.153.050
6.	Lemari Kayu	2022	1	7.959.380
7.	Laci Box	2022	1	1.665.000
8.	LCD Projector/Infocus	2021	3	23.790.000
9.	Meja Kerja Kayu	2021	2	30.000.000
10.	Meja Rapat	2020	1	12.500.000
11.	Meja Resepsionis	2022	1	52.331.054
12.	Kursi Rapat	2020	10	12.500.000
13.	Kursi Tamu	2020	2	25.000.000
14.	Mesin Pemotong Rumput	2020	1	3.000.000
15.	A.C. Sentral	2020	1	30.000.000
16.	Loudspeaker	2021	2	6.328.000
17.	Loudspeaker	2021	1	2.955.000
18.	Sound System	2012	1	50.250.000
19.	Microphone Table Stand	2021	5	18.560.000
20.	Bracket Standing Peralatan	2021	2	597.000
21.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2022	1	18.329.440
22.	Audio Amplifier	2021	1	5.160.000
23.	Tripod Camera	2020	1	500.000

24.	Tripod Camera	2021	2	2.400.000
25.	Lensa Kamera	2021	1	9.300.000
26.	Camera Digital	2020	1	5.000.000
27.	Telephone Mobile	2020	1	7.500.000
28.	P.C Unit	2020	4	40.000.000,00
29.	Lap Top	2020	1	10.000.000,00
30.	Lap Top	2020	1	10.000.000,00
31.	Lap Top	2021	8	128.360.000,00
32.	Lap Top	2021	1	16.250.000,00
33.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	4	16.000.000,00
34.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	8	38.880.000,00
35.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	1	14.300.000,00
36.	External/ Portable Hardisk	2020	2	2.000.000,00
37.	External/ Portable Hardisk	2022	1	1.800.000,00
38.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2021	1	7.834.020.351,00
39.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2012	1	49.800.000,00
40.	Taman lainnya	2022	1	125.051.000,00
41.	Pagar Permanen	2022	1	61.399.000,00
42.	Jalan lainnya	2022	1	250.122.000,00
43.	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	2021	1	49.520.000,00
44.	Belanja Modal Mebel Kursi Tamu	2023	1	40.109.850
45.	Pengadaan Alat Pendingin dan Peralatan Olahraga	2023	2	19.980.000
46.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pekerjaan Dekorasi Interior)	2023	1	174.591.900
47.	Update Aplikasi SIMANIS	2023	1	50.000.000

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023

a. Sumber dan Besar Anggaran

Dinas Perindustrian Provinsi NTB sebagai induk organisasi, mengelola anggaran sebesar Rp. 18.257.026.738,- berasal dari 2 (dua) sumber pembiayaan yaitu dari APBD Provinsi NTB sebesar Rp. 16.599.026.738,- dan dari APBN (dekonsentrasi) dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka – Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 1.658.000.000,-

Pada Tahun Anggaran 2023 total anggaran penyelenggaraan Dinas Perindustrian Provinsi NTB adalah sebesar Rp. 18.257.026.738,- bersumber dari APBN dan APBD Provinsi NTB, anggaran tersebut dikelola oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Balai Kemasan Produk Daerah.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Isu Strategis

Pertambahan penduduk yang cepat mempunyai implikasi pada berbagai bidang. Bertambahnya penduduk yang cepat ini mengakibatkan tekanan pada sektor penyediaan fasilitas tenaga kerja yang tidak mungkin dapat ditampung dari sektor pertanian. Maka untuk perluasan kesempatan kerja, sektor industri perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan secara bertahap di berbagai bidang industri akan menyebabkan secara berangsur-angsur tidak akan lagi bergantung kepada hasil produksi dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa untuk 5 tahun kedepan terdapat 10 industri prioritas yang akan didorong yaitu : 1) industri pangan (makanan dan minuman); 2) industri farmasi, kosmetik dan alat Kesehatan; 3) industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka; 4) industri alat transportasi; 5) industri elektronika dan telematika; 6) industri pembangkit energi; 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industry; 8) industri hulu agro; 9) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; 10) industri kimia berbasis migas dan batu bara. Berdasarkan 10 sektor industri prioritas ini, untuk mencapai Making Indonesia 4.0, difokuskan pada 5 sektor

industri yaitu : 1) industri makanan dan minuman; 2) industri tekstil dan busana, 3) industri otomotif, 4) industri kimia; dan 5) industri elektronika.

Industrialisasi pangan olahan lokal menjadi salah satu program prioritas di Dinas Perindustrian pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perindustrian terus mendukung dan memberikan pendampingan tentang peningkatan kualitas sehingga bisa bersaing di pasar internasional 2023 NTB mengingat bahan baku yang tersedia begitu menjanjikan untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya industri diyakini mampu menjadi penggerak bagi tumbuhnya industri-industri kecil lainnya sehingga industrialisasi dijadikan sebagai lokomotif Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di NTB. Namun satu hal yang harus diperhatikan walau telah ditentukan oleh pemerintah bahwa dalam peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup, dalam kenyataannya yang lebih banyak diperhatikan dalam pendirian industri sekarang adalah keuntungan-keuntungan dari hasil produksinya. Sedikit sekali perhatian terhadap masalah lingkungan, sehingga pendirian industri tersebut akan mengakibatkan pencemaran lingkungan oleh hasil pembuangan limbah industri yang kadang-kadang diabaikan.

Secara umum, dari sudut pandang manajerial, isu strategis dalam sektor perindustrian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kompetensi dan kreatifitas IKM belum dapat bersaing.

Dengan adanya peningkatan kompetensi dan kreatifitas dapat mengembangkan usahanya, terutama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai media untuk jalannya usaha. Terutama pada pelaku UKM untuk tetap bertahan pada persaingan, karena dengan kompetensi kewirausahaan yang dimiliki serta dapat meningkatkan daya saing usaha yang dijalani yang diharapkan dapat membuat lebih unggul dari pelaku usaha lainnya

2. Belum adanya standarisasi terkait desain dan kualitas produk.

Dengan adanya standarisasi desain dan kualitas produk, para pelaku IKM dapat bersaing dengan pelaku usaha lain.

3. Belum adanya kawasan industri sebagai penyangga bahan baku yang terkoordinir.

Perlu adanya Kawasan Industri sebagai pemerintahan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

4. Masih rendahnya penggunaan mesin dan alat-alat otomatisasi untuk melakukan pengolahan produk.

Isu strategis tersebut sejalan guna pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2023, dimana tujuan utama pembangunan adalah penurunan angka kemiskinan serta peningkatan pendapatan masyarakat yang indikatornya terlihat dalam peningkatan perekonomian daerah yang tertuang dalam PDRB provinsi NTB.

2. Permasalahan

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa untuk 5 tahun kedepan terdapat 10 industri prioritas yang akan didorong yaitu : 1) industri pangan (makanan dan minuman); 2) industri farmasi, kosmetik dan alat Kesehatan; 3) industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka; 4) industri alat transportasi; 5) industri elektronika dan telematika; 6) industri pembangkit energi; 7) industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industry; 8) industri hulu agro; 9) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; 10) industri kimia berbasis migas dan batu bara.

Selama empat tahun pelaksanaan pembangunan di bidang industri ada beberapa permasalahan-permasalahan yang di dapat, baik itu permasalahan internal maupun eksternal, adapun permasalahan sebagai berikut :

- Kawasan industri lokal yang belum terintegrasi
- Nilai tambah ekonomi komoditas unggulan belum optimal
- Standarisasi mutu bagi beberapa produk industri yang berorientasi ekspor belum terpenuhi.
- SDM industri belum kompeten
- Mekanisasi pengolahan produk yang masih konvensional dan belum menggunakan intervensi teknologi dan permesinan.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. Capaian Kinerja Tahun 2023 diperbandingkan dengan Penetapan kinerja Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya kinerja bagi perbaikan kinerja masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

- BAB I. PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
- BAB II. PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024
- BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Coss cutting;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara barat Tahun 2023 serta menguraikan rekomendasi dan perbaikan yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa akan datang

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dinas Perindustrian dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 mengawali 3 tujuan yaitu :

1. Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri
2. Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintah daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai akuntabilitas berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian Provinsi NTB menetapkan sejumlah indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan industri. Penetapan indikator ini dilakukan untuk memastikan setiap program dan kegiatan memiliki arah yang jelas serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026.

Sasaran Strategis digunakan untuk menentukan/ mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia. Adapun untuk Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian ada 3 diantaranya sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri – sebagai indikator ukuran peningkatan Daya Saing Kompetensi SDM IKM

2. Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan – sebagai ukuran Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah
3. Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi) – sebagai ukuran keberhasilan Meningkatnya kemandirian fiskal daerah.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah memang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga menjadi tolak ukur apakah daerah tersebut berada dalam keadaan ekonomi yang baik atau tidak. Begitu juga dengan pertumbuhan IKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan IKM juga menjadi salah satu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah. Selain itu, peran pelaku IKM dipandang sangat penting guna meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku IKM dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi, selain itu dengan adanya pertumbuhan industri kecil mempunyai peran yang sangat strategis untuk dapat meningkatkan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, peluang kesempatan berusaha dan juga mengatasi kemiskinan.

Kerjasama sangat menentukan keberhasilan dalam pemasaran produk, dengan kerjasama maka kemungkinan besar produk IKM yang dihasilkan dapat diserap pasar yang target akhirnya adalah peningkatan ekonomi baik untuk NTB maupun untuk IKM itu sendiri. Sebelum melakukan kerjasama tentunya produk-produk olahan harus memiliki penampilan menarik sehingga memiliki kesan pada konsumen. Dengan demikian mutu kemasan produk menjadi satu hal yang sangat penting yang tidak boleh terpisahkan dari perencanaan produksi olahan. Kemasan adalah salah satu hal penting dalam industri olahan karena kemasan merupakan pelindung dari suatu barang, baik barang biasa maupun barang-barang hasil produksi industri. Dalam dunia industri kemasan merupakan pemenuhan suatu kebutuhan akibat adanya hubungan antara penghasil barang dengan masyarakat pembeli. Untuk keperluan ini kemasan harus dapat menyandang beberapa fungsi yang harus dimilikinya seperti tempat atau wadah dalam bentuk tertentu dan dapat melindungi barang dari kemungkinan rusak, sejak keluar dari pabrik sampai ke tangan pembeli, bahkan masih dapat digunakan sebagai wadah setelah isi barang habis terpakai, (dalam hal ini wadah tersebut masih menyandang fungsi iklannya).

Tabel. 2.1. Program Strategis Dinas Perindustrian Tahun 2024.

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	29,430,360,000	
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	50,000,000	
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	-	

Sumber Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2024

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan indikator kinerja utama merupakan sebuah ukuran keberhasilan organisasi dan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan hasil dari berbagai program/kegiatan. Dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 Dinas Perindustrian telah menetapkan tiga indikator kinerja yaitu seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	
1.	Meningkatnya Daya Saing Kompetensi SDM IKM	Persentase Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri	10%	$= \frac{\text{Upah TK tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Upah TK tahun } t - 1} \times 100$
2.	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah	Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,9%-4,7%	$= \frac{\text{PDRB Sektor Industri tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB Sektor Industri tahun } t - 1} \times 100$
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	7%-10%	$= \frac{\text{PAD tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PAD tahun } t - 1} \times 100$

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2024

Dari tabel diatas terlihat jelas 3 indikator kinerja Dinas Perindustrian serta Formulasi, pengukuran, penghitungan yang digunakan dalam melakukan evaluasi atau pengukuran pencapaian. Untuk itu kinerja Dinas Perindustrian akan mudah dievaluasi

oleh semua pihak yang ada sehingga kedepan akan menjadi masukan pada laporan kinerja Dinas.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Kepala daerah dan Kepala Dinas Perindustrian merupakan sebuah penyelenggaraan sistem akuntabilitas yang menunjukkan transparansi dalam perencanaan maupun realisasi pembangunan. Perjanjian tersebut merupakan wujud komitmen dan kesepakatan kedua belah pihak terhadap apa yang harus diselesaikan oleh Kepala OPD sebagai penerima amanah sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Tentunya perjanjian ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB, Renstra OPD dan Rencana Kerja (renja) OPD pada tahun 2022. Adapun perjanjian kinerja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tabel Perjanjian kinerja tahun 2024 Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Daya Saing Kompetensi SDM IKM	Persentase Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri	10%
2.	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah	Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,9%-4,7%
3.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	7%-10%

Sumber Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2024

Dari Perjanjian kinerja diatas diturunkan kembali kedalam program yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut. Sehingga tidak ada program kegiatan yang hanya berjalan sendiri. Adapun jumlah anggaran mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Tabel Indikator Kinerja Utama Program tahun 2024 Dinas Perindustrian Provinsi NTB.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Program/ Kegiatan	ANGGARAN				Penanggung Jawab				
		Uraian	Satuan	Target	Rencana Realisasi per Triwulan		APBD								
					I	II	III	IV	(Rp)	Rencana Realisasi per Triwulan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya Daya Saing Kompetensi SDM IKM	Persentase Peningkatan Upah Kerja pada Lapangan Usaha Industri	%	10	2	3	3	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	632,009,000	126,401,800	189,602,700	189,602,700	126,401,800	Dinas Perindustrian Provinsi NTB
									Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi	632,009,000	126,401,800	189,602,700	189,602,700	126,401,800	
									Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	632,009,000	126,401,800	189,602,700	189,602,700	126,401,800	
2	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah	Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	%						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10,916,784,500	2,183,356,900	3,275,035,350	3,275,035,350	2,183,356,900	
									Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi	10,916,784,500	2,183,356,900	3,275,035,350	3,275,035,350	2,183,356,900	
									Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	72,026,500	14,405,300	21,607,950	21,607,950	14,405,300	
									Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	160,000,000	32,000,000	48,000,000	48,000,000	32,000,000	
									Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2,321,827,000	464,365,400	696,548,100	696,548,100	464,365,400	
									Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8,362,931,000	1,672,586,200	2,508,879,300	2,508,879,300	1,672,586,200	

Selain melaksanakan program strategis untuk mendukung tujuan dan sasaran dalam RPJMD, Dinas Perindustrian juga melaksanakan program rutin sebagai mana kita ketahui bersama bahwa program rutin sebagai penunjang untuk mencapai indikator pembangunan. Setiap program rutin maupun prioritas diatas didukung oleh kegiatan-kegiatan yang nantinya direncanakan mampu mencapai indikator kinerja yang telah disepakati.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sudah menjadi suatu kewajiban, setiap instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dibebankan/diamanatkan pemangku kepentingan yang dituangkan dalam suatu pelaporan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja juga telah diatur dalam ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian Provinsi NTB adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019-2023, Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Pada tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi NTB. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ditemukan bahwa beberapa indikator yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dinilai belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD 2019-2023. Menindaklanjuti catatan tersebut, Dinas Perindustrian melakukan langkah-langkah perbaikan dengan menyesuaikan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) RPJMD Tahun 2019–2023. Penyesuaian tersebut juga mencakup pengintegrasian ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 guna meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Laporan kinerja digunakan untuk melakukan evaluasi dan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penilaian tersebut dilakukan dengan membandingkan kinerja yang

dicapai dengan kinerja yang telah direncanakan serta melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai. LAKIP mengurai semua informasi terkait pelaksanaan, pencapaian target indikator sasaran yang telah ditetapkan serta rencana pencapaian target indikator pada tahun 2021.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Perindustrian diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB dan Indikator perjanjian Kinerja tahun 2022. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat berikut ini :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran pembangunan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang dikedepankan pada Dinas Perindustrian adalah Industrialisasi Unggul dengan indikator pertumbuhan Industri. Adapun target dan realisasi sasaran kinerja Dinas Perindustrian terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Target dan realisasi Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2024

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Daya Saing Kompetensi SDM IKM	Persentase Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri	10%	-1,40%	-14%
2.	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah	Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,9%-4,7%	3,03% (TW III)	
3.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	7%-10%	10,96%	156,57%

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2024

a. Persentase Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri.

Persentase Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha dihitung dari rata-rata pendapatan dan upah tenaga kerja di sektor industri pengolahan pada tahun ini dikurangi tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, rata-rata upah tenaga kerja di sektor industri pengolahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan dari Rp1.888.303 pada tahun 2023 menjadi Rp1.861.737 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya pengurangan sebesar Rp26.566, yang jika dihitung secara persentase, adalah sebesar -1,40% (minus satu koma empat puluh persen).

b. Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan.

Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor industri pengolahan diukur dari laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan. Target tahun 2024 sebesar 3,9-4,7% dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar 3,03% atau terdapat deviasi -0,87 poin. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, dengan realisasi sebesar 2,51%, maka terdapat peningkatan sebanyak 0,52 poin atau pertumbuhan sebesar 20,72%. Produktivitas industri pengolahan di Provinsi NTB masih didominasi sub sektor industri makanan dan minuman. Capaian ini mengindikasikan bawah peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi NTB semakin besar.

c. Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)

Pada indikator Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi), kegiatan penerimaan PAD dikelola oleh UPTD Balai Kemasan Produk Daerah dengan target Penerimaan PAD pada tahun 2023 adalah sejumlah Rp.90.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 91.936.225,- dengan peningkatan penerimaan dari tahun 2022 yakni sebesar **10,17%** (sepuluh koma tujuh belas persen).

Adapun target pada tahun 2024, masih sama yakni sejumlah Rp.90.000.000,- dengan Realisasi penerimaan PAD pada UPTD BKPD pada tahun 2024 adalah sejumlah Rp.102.936.800,- Sehingga penambahan jumlah pendapatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 adalah sejumlah Rp.10.073.575,- atau peningkatan penerimaan sebesar 10,96%.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Guna mengetahui keberhasilan suatu kegiatan maka diperlukan alat ukur berupa pembanding realisasi kinerja dari sasaran starategis yang telah ditetapkan tahun lalu dengan realisasi target kinerja tahun sekarang. Dengan pendekatan capaian realisasi maka diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Perindustrian

Provinsi NTB tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator sasaran tahun 2023	Indikator Sasaran Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Naik/Turun Capaian 2023 Terhadap Capaian 2022 (%)
				Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM IKM	Persentase Pertambahan SDM Industri yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (%)		50	95,16			190,32		
2.	Meningkatnya Kapasitas Produk Industri	Pertambahan Nilai Investasi Pelaku Industri (Miliar)		179,91	180,4			100,2		
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri (%)		9	9,02			100,22 %		
4.	Meningkatnya Daya Saing Kompetensi SDM IKM		Persentase Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri			10%				
5.	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah		Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan			3,9%-4,7%				
6.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah		Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)			7%-10%	10,96%		156,57 %	

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2024

Tabel diatas memperlihatkan realisasi dan capaian indikator sasaran strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2023 dan tahun 2024. Apabila kita membandingkan realisasi maupun capaian dari indikator-indikator tahun 2023

dengan realisasi maupun capaian indikator-indikator tahun 2024, maka kita bisa melihat dari tabel perbandingan diatas hanya tidak ada satupun indikator sasaran pada tahun 2024 yang bisa dibandingkan dengan indikator sasaran pada tahun 2023, karena sama-sama memiliki sasaran dan indikator yang berbeda.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB telah mengalami beberapa kali revisi. Dalam revisi tersebut terjadi perubahan pada sasaran, indikator sasaran dan targetnya. revisi tersebut juga mencakup pengintegrasian ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 guna meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Untuk perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2024		Capaian tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) (%)
			Target	Realisasi			
1.	Meningkatnya Daya Saing Kompetensi SDM IKM	Persentase Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri	10%	- 1,40%	-14%	20%	-7%
2.	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah	Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	3,9%- 4,7%	3,03 (TW III)		4,0 – 5,0 %	
3.	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	7%-10%	10,96%	156,57%	<15%	73,07%

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2024

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.

Tidak bisa dibandingkan dengan target nasional karena adanya perbedaan indikator indikator kinerja yang digunakan antara provinsi dan indikator nasional

Memperhatikan hakekat (pemerintahan) daerah sebagai hasil desentralisasi dalam negara kesatuan sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan kata lain, pada satu sisi prinsip desentralisasi menciptakan otonomi daerah (termasuk dalam konteks pembangunan), pada sisi yang lain perlu dicapai keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional, hubungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Untuk itu Dinas Perindustrian sebagai perpanjangan tangan dari tujuan Pembangunan Kementerian Perindustrian melakukan kegiatan yang selaras dengan target Nasional.

Keselarasan rencana pembangunan dapat dipahami sebagai tingkat sejauh mana rencana pembangunan dari unit/tingkat pemerintahan lebih rendah merupakan bagian integral (satu kesatuan) dari dan disusun mengacu rencana pembangunan dari unit/tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, dalam konteks Indonesia, yaitu keselarasan rencana pembangunan Provinsi dan Kabupaten/kota dengan rencana pembangunan Nasional. Dengan demikian, tingkat kontribusi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/kota kepada pemerintahan pusat dapat diidentifikasi dalam rangka memastikan tujuan pembangunan nasional. Namun demikian, dalam UU No. 25/2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak ada penegasan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.

Melihat dari ketiga indikator Dinas Perindustrian tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan target yang ada di tingkat nasional, karena adanya perbedaan indikator dari level provinsi dan level nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang permasalahan dan solusi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dihadapi. Seperti halnya pertumbuhan industri didukung dan terkendala serta proyeksi bahan baku yang mendukung untuk pencapaian dari sasaran tersebut, Hal ini tentunya perlu analisis yang mendalam seperti analisis SWOT.

Namun ada analisis pendekatan yang bisa digunakan sebagai evaluasi keberhasilan kinerja yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan penghitungan dari realisasi yang dicapai. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Adapun analisis yang dapat dilakukan pada indikator kinerja Dinas Perindustrian tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indikator ke 1 (Percentase Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri).

Analisis penyebab turunnya Percentase Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri yang adalah antara lain :

- Perubahan Komposisi Tenaga Kerja : Peningkatan jumlah tenaga kerja disektor industri pengolahan yang tidak diimbangi dengan jumlah pendapatan yang diterima, serta Tingginya tingkat pergantian tenaga kerja (turnover) di sektor industri pengolahan yang menyebabkan turunnya rata-rata upah. Pekerja dengan pengalaman yang lebih tinggi

mungkin meninggalkan industri, digantikan oleh pekerja baru dengan upah yang lebih rendah.

- Kondisi Ekonomi Global dan Lokal : Dengan adanya inflasi dan Fluktuasi Ekonomi Kondisi ekonomi IKM dan pegusaha di dunia industri menjadi tidak stabil, termasuk kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi, telah memberikan tekanan pada perusahaan.
- Sebagian besar industri pengolahan di NTB masih didominasi oleh usaha padat karya dengan margin keuntungan yang relatif kecil. Ketergantungan IKM pada proses manual dan kurangnya investasi pada teknologi menyebabkan keterbatasan dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, yang pada akhirnya berdampak pada struktur pengupahan
- Industri pengolahan di NTB belum sepenuhnya terdiversifikasi ke sektor bernilai tambah tinggi, yang cenderung mampu memberikan kompensasi lebih besar kepada tenaga kerja.

Untuk mengatasi tantangan yang menyebabkan penurunan rata-rata upah tenaga kerja di sektor industri pengolahan, beberapa solusi dan langkah strategis yang telah dan terus dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB antara lain adalah sebagai berikut :

- Melakukan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja : Dinas Perindustrian Provinsi NTB terus melakukan peningkatan keterampilan kerja kepada SDM IKM serta bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Pelatihan ini dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan memungkinkan mereka mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi
- Melakukan modernisasi dan diversifikasi industri pengolahan : Perusahaan di sektor industri pengolahan serta IKM didorong untuk mengadopsi teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi produksi. Diversifikasi ke sektor industri bernilai tambah tinggi juga diperlukan untuk menciptakan peluang kerja dengan upah lebih baik

- Pengawasan dan Penegakan Kebijakan Pengupahan : Dinas Perindustrian serta seluruh Stakeholder terkait pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memastikan implementasi kebijakan pengupahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini meliputi pengawasan terhadap penerapan UMP di perusahaan dan seluruh pelaku usaha serta pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan.

2. Indikator Kinerja 2 (Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan)

Industri pengolahan memainkan peran penting dalam perekonomian karena kontribusinya terhadap penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. Namun, keberhasilan atau kegagalan usaha di sektor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah analisis penyebab keberhasilan dari indikator ini antara lain:

3. Indikator kinerja 3 (Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB dikelola oleh Balai Kemasan Produk Daerah yang merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui kegiatan yang terkait dengan pengembangan dan pemasaran produk kemasan daerah. Balai Kemasan Produk Daerah berfungsi untuk mendukung IKM dan industri daerah dalam menciptakan kemasan produk yang menarik, aman, dan berkualitas tinggi. Kemasan produk yang baik memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing produk daerah di pasar lokal dan internasional, serta memberikan nilai tambah pada produk itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Balai Kemasan Produk Daerah berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan, produksi, dan pemasaran kemasan produk daerah. Dalam konteks ini, Balai Kemasan Produk Daerah berperan penting sebagai fasilitator bagi IKM dan industri lokal dalam meningkatkan daya saing produk mereka melalui kemasan yang berkualitas. Beberapa sumber utama PAD yang dapat

dihadirkan oleh Balai Kemasan Produk Daerah salah satunya adalah layanan design dan produksi kemasan.

Keberhasilan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Balai Kemasan Produk Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Salahsatunya adalah menyediakan berbagai jenis produk kemasan yang dapat menarik berbagai jenis pasar. Produk yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti kemasan inovatif atau ramah lingkungan, akan lebih diminati dan berpotensi mendatangkan pendapatan lebih besar dan juga dengan adanya Pelatihan dan Pemberdayaan SDM sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam produksi kemasan. Tenaga kerja yang terampil dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk.

6. Cross Cutting.

Dalam melaksanakan program-program unggulannya, Dinas Perindustrian juga berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah/lembaga/stakeholder lainnya yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Tabel Cross Cutting

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Cross Cutting
1	Meningkatnya Daya Saing Kompetensi SDM IKM	Persentase Peningkatan Upah Kerja pada Lapangan Usaha Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	632,009,000	
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	632,009,000	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	632,009,000	
2	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Daerah	Produktivitas Lapangan Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10,916,784,500	
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	10,916,784,500	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	72,026,500	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	160,000,000	

			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2,321,827,000	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8,362,931,000	MUI, Kemenkumham, BBSPJIA,
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		50,000,000	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		50,000,000	
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	11,504,231,500	
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	17,881,566,500	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	236,731,500	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	17,644,835,000	

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2024

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya termasuk efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis industrialisasi adalah dengan melakukan perencanaan program kegiatan yang selaras dengan visi misi RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) tahun 2024-2026, dengan demikian sasara industrialisasi dapat sinkron dengan kegiatan yang telah ada pada OPD terkait. Berikut tabel efisiensi anggaran Dinas Perindustrian pada tahun 2024.

Tabel 3.5 Tabel Efisiensi Anggaran tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target	Realisasi	capai an	anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%	Relevan si dengan Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya Daya Saing Kompetensi SDM IKM	Persentase Peningkatan Upah Kerja pada Lapangan Usaha Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				632,009,000				
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				632,009,000				
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 keg	2 keg	100%	632,009,000	595,731,683	94,26		36,277,317
2	Meningkatnya Lapangan Kerja	Produktivitas Lapangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				10,916,784,500				

	dan Produktivitas Daerah	Usaha Ekonomi Sektor Industri Pengolahan								
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				10,916,784,500			
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 keg	1 keg	100%	72,026,500	72,026,500	100	0
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahkan Industri	20 IKM	20 IKM	100%	160,000,000	152,173,353	95,11	7,826,647
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 keg	4 keg	100%	2,321,827,000	2,083,429,030	89,73	238,397,970
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 keg	4 keg	100%	8,362,931,000	7,882,898,760	94,26	480,032,240
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				50,000,000			
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				11,504,231,500			
			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				17,881,566,500			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 keg	1 keg	100%	236,731,500	223,440,000	94,39	13,291,500
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 keg	1 keg	100%	17,644,835,000	13,910,669,581	78,84	3,734,165,419

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2024

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian mengelola anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 40,702,516,299,- dan terealisasi sebesar 88,01% atau senilai Rp 35,823,978,205-, sehingga Dinas Perindustrian dapat menghemat anggaran sebesar Rp 4,878,538,094,-.

8. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program industrialisasi adalah program yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk unggulan yang ada di NTB yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Saat ini Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong program industrialisasi dengan strategi hilirisasi. Tujuannya agar terbentuk ekosistem industri sehingga akan

meningkatkan nilai tambah dan memicu geliat perekonomian. Provinsi NTB sudah memiliki enam sektor industri prioritas. Yakni industri pangan, hulu agro, permesinan alat transportasi, hasil pertambangan, kosmetik, farmasi herbal dan kimia, dan ekonomi kreatif.

Sektor industri pangan telah menghasilkan berbagai capaian penting. Mulai dari kegiatan standarisasi hingga sertifikasi olahan pangan local, yakni halal, merek, BPOM PIRT, dan Uji Laboratorium produk lainnya. Industri hulu agro juga mulai menampakkan capaian. Misalnya industrialisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang menghasilkan minyak atsiri, minyak cengkeh, minyak kayu putih, dan lain-lain. Capaian yang tak kalah penting dalam industri agro ini adalah pembangunan pabrik pakan terbesar di Provinsi NTB, atau feedmill yang berlokasi di STIPark Banyumulek. Selain itu, industri permesinan alat transportasi, sektor ini telah mencatatkan sejumlah hasil karya putra putri NTB. Diantaranya pengembangan kendaraan listrik Le-Bui, Matric – B, dan ngebUTS. Serta berkembangnya aneka mesin-mesin teknologi sederhana dari IKM untuk IKM. Sementara industri hasil pertambangan lebih fokus dalam menyiapkan segala sumber daya untuk program industri turunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain itu juga industri kosmetik, farmasi herbal dan kimia, telah mengembangkan industri kosmetik dan farmasi herbal (organik Lombok dan teh kelor). Selain itu, pendampingan pembuatan APD (alat pelindung diri) buatan IKM, standarisasi produk dan bantuan peralatan bagi IKM kosmetik, farmasi herbal, dan alat kesehatan (APD) dan yang terakhir adalah industri ekonomi kreatif, kegiatannya lebih banyak melibatkan kaum melinial sebagai motor penggeraknya. Seperti muslim fashion industry yang mengantarkan NTB menjadi kiblat muslim fashion di Indonesia. Dalam industri ini juga dilakukan pelatihan pewarna alam untuk kain tenun, bimtek tenun menggunakan ATBM (alat tenun bukan mesin), festival desainer tenun Lombok Sumbawa, dan fashion show tenun di tingkat nasional. Keenam sektor tersebut akan terus didorong untuk membentuk pondasi ekosistem industri dari hulu ke hilir.



Inovasi produk IKM dampingan Dinas Perindustrian

Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu diakui dan perlindungan agar ide-ide cemerlang dan kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut.

Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan yang terbaru yaitu undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan. Tidak hanya karya cipta, di bidang teknologi (hak paten) dan kreasi tentang penggabungan antara unsur bentuk, warna, garis, desain produk industri serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa (merek) juga perlu diakui dan dilindungi dibawah perlindungan hukum. Dengan kata lain Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) perlu didokumentasikan agar kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah.

Mengingat pentingnya akan HaKI tersebut Pemerintah Provinsi NTB ikut andil bagian sebagai perlindungan akan karya seni masyarakat NTB. HaKI tersebut dibebankan pada Dinas perindustrian sebagai pengelola dan pelaksana urusan bidang HaKI. adapun jumlah pendaftaran HaKI merek, yang telah didaftarkan sebagaimana pada tabel berikut :

**TABEL 3.6 CAPAIAN PENDAFTARAN HAKI MEREK
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024**

NO.	NAMA	NAMA MEREK	JENIS PRODUK
1.	Dwiana Putriani	AKIKUKI	Industri Kue Basah
2.	Baqiatussolah	Industri Olahan Minuman	BRAZILIAN LEMONADE BIBIE's
3	Juliana	Gaishana Pearl	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia
4	Lalu Rahmat Hidayat	KELUARGA CEMARA MASBAGIK	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran
5	Hery Indra Permana	Kung Isya	Industri Makanan

6	Januardi	LEBAH PENDUA	Industri Produk Masak Lainnya
7	Ziadatul Amelia	Mutiara Aesthetic Lombok	Industri Perhiasan Mutiara
8	Parihun	Mutiara Lombok 2	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia
9	Husni Hari	RUMAH KREATIF LINSI	Industri Kriya
10	Baiq Zul Hannaniah	Aiyra	Industri Produk Makanan Lainnya
11	Idayanti	sleman in9es	Industri Pertenunan
12	Saiful Haq, ST	mingER	Industri Mesin Pertanian
13	Lalu Suprayatna	Lombok dSign	Industri Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak
14	Andi As'adi	Laskar Engineering Lombok	Industri Permesinan
15	Sarinda Farid Rizki	UNGGA CREATIVE	Industri Kerajinan
16	Rahadi Irawan	DE'ANTIQ	Industri Pengolahan Kopi
17	Sulrahman	Es Teh Jumbo Daeng	Industri Minuman Ringan
18	Heri Adrian	Silvia Silver	Industri Perhiasan Mutiara
19	Rusmini	BUNGA ROSA SOLAH	Industri Produk Masak Lainnya
20	Baiq Atikah	DAPUR DENDE Lombok	Industri Produk Masak Lainnya
21	Malwi	NYANTENGTE	Industri Sirop
22	Bambang Patmaraga	KOKO	Industri Minyak Kelapa
23	Maryaningsih	BUNDA MAYA	Industri Roti dan Kue
24	Muliani	A-THREE	Industri Konveksi
25	Mohammad Syukron	Molly BAKERY	Industri Produk Roti dan Kue
26	Harvia Hayati	SASAKRIYATIF	Industri Batik
27	Asrimin Silvia	Dende PURI	Industri Produk Roti dan Kue
28	Baiq Yuliana Fitri	PALEMPAT	Industri Produk Roti dan Kue
29	Andre Kurniawan, S. Pd	Bajang Meriri	Industri Furniture Dari Kayu
30	Masroni	MRETTOE	Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan sejenisnya
31	Rani Zulhidayani	Erzed macrame	Industri Anyaman dan Rajutan
32	Abdul Rahim, S. Pd	AZNA JAYA	Industri Produk Makanan Lainnya
33	Baiq Dewi Cempaka	KOPI CHAMP	Industri Olahan Kopi
34	Baiq Siti Rohmah	NUSYA PIZZA & BAKERY	Industri Produk Roti dan Kue
35	Baiq Holisa Diana	Holisa Herbal	Industri Minuman Lainnya
36	Fitriani	al-fatih Bale Roti	Industri Roti dan Kue
37	Jupriadi	mahkota ruang	Industri Furniture Dari Kayu
38	Miftahul Jannah	Bale Rizki	Industri Roti dan Kue
39	Baiq Septiani Sertuvil Laeli	Monspring	Industri Roti dan Kue
40	Lalu Isnadi	adityalalu	Industri Furnitur Dari Kayu
41	Baiq Widyasari	Dy Kitchen	Industri Roti dan Kue
42	Baiq Muaddah	Muaddah Snack	Industri Roti dan Kue
43	Sarifah	Tenun Maloka	Industri Kain Tenun Ikat
44	Puspitasari Mujiwinarni	Pawon Inaq	Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan Sejenisnya
45	Lalu Ratmaji	BALENTE KAMU ADALAH KITA	Industri Furnitur Dari Kayu

46	Nurul Unsyia Akmal	Raturis Food	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
47	Sumiati	ATIKSUMIHOME	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
48	Idayani	Desnalida	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
49	Oktavia Nurhidayani	Keripik Singkong Elvina	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
50	Aldillah Rahmatullah	ADR SKIN GLOW	Industri Kosmetik
51	Isbeni Samsi	Mahdalika	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
52	Ali Soekotjo	Toko Emas ASELI	Industri Perhiasan Emas
53	Marjan	RAOS (Raboq Organik Super)	Industri Kimia Dasar Organik
54	Arsitari Kinanti	SATE BULAYAK MAK ATON	Industri Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman
55	Muhammad Zikry Nugraha	OHAYO SUSHI	Industri Jasa Kedai Makanan
56	Chairanita	JAGUAR STEEL	Industri Barang Logam Untuk Konstruksi
57	Heru Adi Kusuma	PUTRA NTB	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
58	Heru Adi Kusuma	MUTIARA NTB	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
59	Netra Firdaus Meridien, S.Adm	Kopi Keliling Damian Lombok	Industri Minuman Ringan
60	Robiatun Sholihah	DR DONUTS	Industri Kue Basah
61	Aditya Nugrahawati	Hasna Fashion	Industri Fashion
62	Nurul Hidayah	Kelep	Industri Makanan
63	Etik Susilawati	AR Teras Jaje	Industri Makanan
64	Humaiziah	UEMM SNACK	Industri Makanan
65	Nurul Aini	Sambal Tolang Komak	Industri Makanan
66	Nur Hidayati	Cantika Fashion	Industri Fashion
67	Zurniwati	Cilok Tebao Eat	Industri Makanan
68	Sumarni	SIUNG GEMLANG	Industri Pengolahan Sampah
69	Robby Rochmansyah	THE STEAK 88	Industri Makanan Olahan
70	Pipin Mutiawati	Kita's PIZZA	Industri Makanan Olahan
71	Armasih	Rinjani's Family HOMES TAY	Industri Jasa Penginapan
72	Armasih	Kopi Lokak	Kopi
73	Yunis Arista	MONDY	Industri Olahan Makanan dan Minuman
74	Hanief Fanshuri	NONASUKA	Industri Olahan Minuman
75	Niadi	Sembah ulun Coffee	Industri Olahan Minuman
76	CV. NEYON BERKAH BERBAGI	NEYON	Industri AMDK
77	Nurjanah	PRESSAQ	Industri Pemindangan Ikan
78	NI Wayan Putri Adnyani	Whanau	Industri Jasa Kesehatan
79	Herdian Sasongko, S. Sos	CV. RETRO ADVERTISING	Industri Jasa Periklanan
80	Amrani Amrana Rusli	S'LALU BAIQ	Industri Pengolahan Kopi
81	Amrani Amrana Rusli	S'LALU BAIQ	Industri Pengolahan Madu
82	Baiq Noviana Irmayanti, SE	Novi Tour Tour & Education School	Industri Jasa Tour/Perjalanan
83	I Gde Putu Iwan Budiartha, ST	BSL (Brahmastra Sejahtera Lombok)	Industri Penggalian (Pasir, Krikil dan lainnya)
84	Swira Ekalina	Pilihan Terbersih	Industri Kosmetik (Pembersih Wajah)
85	Rikha Apriyani Jayanthi,SE	Mr. Dimdim Bakery	Roti Manis Jepang, Roti Tawar, Roti Sobek, Roti Sisir dan lainnya

86	Ghani Bagus Karjaya	Angkotua	Olahan Makanan dan Minuman
87	Ni Putu Eni Diantari	Antaris	Alas Kaki (Sepatu dan Sandal)
88	Ni Putu Eni Diantari	Antaris	Fashion
89	Erizal Lukman	Asano	Rumah Makan dan Restoran
90	Tolip Suprianto, S.A.B	Askamix	Industri Aspal
91	Asosiasi Pengusaha Ayam Taliwang	Aspeta	Kuliner Ayam Taliwang
92	Yolanda Abigail Turmawan	Buttered Patisseri	Olahan Makanan dan Minuman
93	Sumaidi	Cilok Ngangak	Olahan Makanan dan Masakan (Cilok)
94	Ida Made Santika Kusuma Yogi	Hifato	Susu Herbal
95	Mardiana	Kiya Shop	Online Shop
96	Rosmini	La Rose	Tas Tenun
97	Ahmad Moerad	Moerad	Kuliner Ayam Taliwang
98	Ida Made Santika Kusuma Yogi	Nasanti	Herbal
99	Fitria Susiani, S.Pd	Nauzila	Kosmetik / Skincare
100	Ida Made Santika Kusuma Yogi	Sahira Natural	Herbal
102	Eti Aspi Sugiarti	Starfood	Industri Makanan dan Masakan Olahan
103	Ida Made Santika Kusuma Yogi	Vocas	Manajemen Digital Agency

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2024

Dinas Perindustrian juga memfasilitasi Label halal yang merupakan sebuah kewajiban dalam usaha makanan maupun usaha kosmetik, dengan label halal dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap suatu produk. Produk yang bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan label halal tersebut. Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Kegiatan fasilitasi halal di Dinas Perindustrian bertujuan untuk mendukung pelaku usaha, khususnya di sektor industri kecil dan menengah (IKM), dalam memperoleh sertifikasi halal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, serta memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal yang berlaku. Pengadilan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim yang notabene sebagai konsumen terbesar di Indonesia. Masa berlaku sertifikat halal tersebut adalah dua tahun, hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi produksi selama berlakunya sertifikat tersebut. Adapun produk olahan yang telah difasilitasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.7 Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2024

NO	Nama Pemilik	Nama IKM	Jenis Produk	Merek	Alamat Usaha
1	Fitriatun	Kebon Cave	Resto / Kedai		Loang Balok Kota Mataram
2	Ni Nyoman Arwiani	Suns & Chiill	Resto / Kedai		Loang Balok Kota Mataram
3	Dicky Ardian Patimoa	Q-L Cafe	Resto / Kedai		Loang Balok Kota Mataram
4	Wiwin Dariani	Kave Cafe	Resto / Kedai		Loang Balok Kota Mataram
5	Heni Sri Septiana	Venta Moment	Resto / Kedai		Loang Balok Kota Mataram
6	Apriani	Trofis Cafe	Resto / Kedai		Loang Balok Kota Mataram
7	Muhammad Ali Imron	Sunset Land	Resto / Kedai		Loang Balok Kota Mataram
8	Yoga	Y2 Cafe	Resto / Kedai		Loang Balok Kota Mataram
9	Berlian Adam Al-Faqih	Favela Cafe	Resto / Kedai		Loang Balok Kota Mataram
10	Rofida Dewi	J.P Cafe	Resto / Kedai		Loang Balok Kota Mataram
11	Deanita Aprilia	Seafood gendut	Resto / Kedai		Loang Balok Kota Mataram
12	Adi Herwahyudi	PT. Yola pribumi	Ayam Rarang	Pelecing Makyus Ayam Rarang	Jl. Raya Rarang labuan Lombok Kab. Lotim
13	Sohaniatun anwariah	Bakso Barokah	Bakso Sapi	BAKSO BAROKAH	Jl. Saleh Sungkar kelurahan Bintaro kebonroek Ampenan
14	Muhammad Amien Jundi	Bakso Sapi Mas Amin	Bakso Sapi	Bakso Sapi Mas Amin	Jalan Majapahit, kekalik, Mataram (depan dispora NTB) . Untuk alamat produksi Jalan Adelweis Raya no.44 btn sweta indah
15	Septina Rahmatika Sari	GIKA FOOD LOMBOK	Abon Ayam Abon Sapi	GIKA FOOD LOMBOK	Jalan Palapa II GANG Usaha Karang Tapen, Kota. Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
16	Naufal Armanditya	Meathyme	Sei Sapi	Meathyme Steak House & Coffee Shop	Jalan Gajah Mada No. 30, Pagesangan, Kota Mataram.
17	Sujarman	Sasak maiq	Abon daging & krispy ceker ayam	Sasak maiq	Jl altis perumahan griya asri desa senteluk batulayar lobar
18	Ratih Cecilia Meidiannitha	UD. Delta Sebelas	Rarit (dendeng sumbawa)	Rarit Dapoer Logic	Kuranji Dalang (Royal Madinah Blok Quba A-21)
19	Atik	Atik	Abon, kerupuk, keripik paru	Atik	Seganteng
20	AHMAD ARDHABILLY	UD. BISMILLAH BERKAH	Daging Frozeen, Abon		Taliwang
21	Hery Indra Permana	KUNG ISYA TAHU BAKSO	Tahu Bakso	Kung Isya	Jl. Dr wahidin gg. Srigati, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
22	Husnul Hatimah	UD. Narwa	Abon Ayam	UD. NARWA	Jl. Setiayaki No. 10 Seganteng Subagan Mataram, Kota. Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
23	Anang Hendriawan	UD Sido Mampir	Bakso Sapi	Sido Mampir	Jln sapta pesona no 50 BTN pagutan permai
24	Nurhidayati	UD Depot Taliwang	Ayam Taliwang Kemasan	BecaBero	Jl Airlangga no 1 E Mataram Lombok
25	Lutfi Ramli	Cilok Pejabat	Cilok	Cilok Pejabat	Jl. Airlangga Puna Karang Kateng, Kelurahan Puna Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

26	Budi Septiani	Griya Tinampi	Abon Sapi, rarit abon ayam	kriuk gurih	Desa Sigerongan
27	Herdi Purnawan	MBC Bakso Bajang	Bakso Sapi	MBC	Jl. Gili Meno gg 2 No. 10 Marong Jamak Selatan
28	Ahmad Moerad	CV. Harapan Satu	Bumbu Pelalah Taliwang	Ayam Taliwang Moerad's	Kr. Taliwang Cakranegara
29	Ita suyanti	Dapur cantik rasa	Abon dan bakso	Dapur cantik rasa	Pagutan
30	Yulita Usmariana	UD. AZ-DZIKRA UTAMA	Abon Ayam dan Abon Sapi	Serat Halus	Jl. Darul Hikmah Labuapi Kab. Lombok Barat
31	Darmawati	UD. Lista	Kerupuk Berbasis Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan	Kerupuk Ceker Ayam Taliwang	Jalan Ade Irma Suryani, Gang Salam II, Lingkungan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi NTB
32	Mahdi	Babah Bakery	Pizza dan Roti	Babah Bakery	Jln. Arya Banjar Getas Gang Hiu Putih Tanjung Karang Permai Sekarbela Mataram
33	Baiq nurhaeni	ALRAJIHI	Abon ayam, abon daging sapi, abon ikan, abon ikan asin	ALRAJIHI	Pelempat rt02/07 meniting batu layar lobar NTB
34	Desy Wahyuningsih	Dapur AA	Abon Ayam dan Abon Sapi		Jl. Babussalam No. 3 karang Taliwang
35	Hilda Mariana Hapsah	Adixena Kitchen	Abon Ayam dan Abon Sapi		Jl. Langko No. 72 Dasan Agung Mataram
36	Yuliana Dian Masruroh	Makkreezz Cemilan Lombok	Abon Ayam dan Rarit		Komplek Al Hidayah No. 4 Jl. Baturinggit Karangpule Sekarbela Mataram
37	Nurbaiti	KWT Berlian	Abon Ayam dan Abon Sapi	KWT Berlian	Seganteng
38	Pandu Yuspitra	UD. Arkana	Kerupuk Kulit Sapi	UD. Arkana	Seganteng Gubuk Pande Cakra Selatan
39	Muhammad Ibnu haikal	UD. Bintang Berlian	kerupuk kulit	Bintang Berlian	seganteng cakranegara selatan
40	Bohari	Sari Mujur	Kerupuk kulit	Sari Mujur	seganteng cakranegara selatan

Selain melaksanakan fasilitasi HaKI Merk dan fasilitasi Halal, Dinas Perindustrian Provinsi NTB juga memfasilitasi beberapa IKM olahan pangan lokal untuk melalukan uji kecukupan panas (F0) pada produknya, yang berguna untuk memastikan proses produksi produk olahan pangan agar dapat menekan bakteri. Sehingga makanan bisa tahan hingga satu tahun tanpa harus menggunakan bahan pengawet. Dalam pelaksanaanya Dinas Perindustrian bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Berikut nama-nama Ikm yang difasilitasi uji F0 :

Tabel 3.8 Daftar Nama IKM yang difasilitasi Uji F0

NO.	NAMA	NAMA IKM	ALAMAT	JENIS PRODUK
1.	H. Sofian Maulani	CV. Ayam Taliwang Irama	Jl. Ade Irma Suryani no. 10 Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram	Ayam Taliwang Pelecingan
2.	Rusmini	Bunga Rosa	Gubuk Sukamulia Tengah Suela Daya, Lombok Timur	Ayam Sambal Laos

3.	Adina Edian Putri	Santara Food	Jl. Peternakan No.1 Negarasakah Utara, Mayura, Cakranegara, Mataram	Sate Tanjung (Olahan Ikan Basah)
4.	H. Muslehuddin	Goyang Lidah	Jl. Dakota, Mataram	Bumbu
5.	Hj. Nurhidayati	UD. Depot Taliwang	Jl. Airlangga No 1E, Mataram	Sambal Santan Taliwang
6.	Nurani Syahidah	BRAND A Food	Desa Lenek, Lombok Timur	Sambal Pelalah
7.	Ahmad Moerad	CV. Harapan Satu	Gg. Unggas 2 No. 1, Karang Taliwang, Kec. Cakranegara	Sate Bantengan
8.	Hj. Darmawati	Taliwang Nada	Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Mataram	Ayam Taliwang Pelalah
9.	Farhannudin	Warung Taliwang Sejati	Jl. Ade Irma Suryani Kr. Taliwang Cakranegara	Ayam Taliwang Madu
10.	Aulia Rahma, SE	Dapur Aulia	Teruwai, Desa Teruwai, Kec. Pujut, Lombok Tengah	Sambal Cengeh
11.	Roby Sahrullah	Agal Deta	Desa Marente, Kec. Alas Sumbawa	Bumbu Masakan Khas Sumbawa
12.	Zulhadi	Al Amin	Desa Karang Bedil, Pemenang, Lombok Utara	Santan Olahan
13.	Baiq Afriza Lia Fitri	Lumbung Pangan	Dusun Lilir, Desa Lenek Daya Kec. Lenek, Lombok Timur	Bumbu Dasar Merah
14.	Komariah	UD. Faziela	Dusun Beleke, Desa Jembatan Gantung, Kec. Lembar, Lombok Barat	Sayur Ares

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2024

Dinas Perindustrian mempunyai peran memfasilitasi penyelenggaraan standarisasi sertifikasi untuk pelaku usaha di NTB. Manfaat standarisasi adalah mendorong terciptanya produk berkualitas, memudahkan mendapatkan produk berkualitas, meningkatnya daya saing bagi para produsen, memberikan perlindungan bagi produk lokal. Standarisasi dan sertifikasi juga bisa memberi kemudahan dalam menerobos pasar lokal, regional maupun internasional. Namun dalam pelaksanaan fasilitasi ini tidak luput dari beberapa kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah adanya keterlambatan penyampaian berkas persyaratan sertifikasi dari para IKM dan adanya kesalahan dalam pengisian persyaratan Fasilitasi sertifikasi, sehingga bisa memperlambat proses pengajuan. Upaya-upaya telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dalam menghadapi kendala-kendala diatas, salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi tata cara pengisian persyaratan dalam pengajuan sertifikasi maupun pengajuan untuk uji laboratorium.

B. Realisasi Anggaran

Pelaporan realisasi anggaran bertujuan memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas tetap dipersyaratkan sebagai salah satu bagian dalam laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

1. Realisasi APBD

Laporan realisasi anggaran menjadi salah satu bagian penting dan tidak terpisahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja. Melalui laporan realisasi anggaran, kita mendapatkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Namun, seringkali didapat realitas anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Realisasi anggaran Dinas Perindustrian Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Program Tahun 2024

Nama Prog/ Keg.	Jumlah Anggaran DPA Perubahan (Rp)	Total Realisasi Keuangan (Rp)	Saldo Anggaran (Rp)	Percentase Realisasi Anggaran
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76,815,000	76,625,000	190,000	99.75%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,561,177,549	7,191,117,455	370,060,094	95.11%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,906,600	9,259,000	647,600	93.46%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	857,139,800	822,273,552	34,866,248	95.93%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,608,856,100	1,490,290,564	118,565,536	92.63%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222,010,000	182,215,194	39,794,806	82.08%
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	11,548,793,500	10,786,380,753	762,412,747	93.40%

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	72,026,500	72,026,500	-	100.00%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwiliyahan Industri (Induk)	160,000,000	152,173,353	7,826,647	95.11%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Induk)	2,321,827,000	2,083,429,030	238,397,970	89.73%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Induk)	-	-	-	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Induk)	8,994,940,000	8,478,751,870	516,188,130	94.26%
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Induk)	-	-	-	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	50,000,000	20,060,000	29,940,000	40.12%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	50,000,000	20,060,000	29,940,000	40.12%
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	-	-	-	-
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	-
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	-	-
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	-	-	-	-
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	-	-	-
JUMLAH	21,934,698,549	20,578,221,518	1,356,477,031	93.82%
Balai Kemasan				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	17,881,566,500	14,134,109,581	3,747,456,919	79.04%
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	17,881,566,500	14,134,109,581	3,747,456,919	79.04%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Balai Kemasan)	236,731,500	223,440,000	13,291,500	94.39%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Balai Kemasan)	17,644,835,000	13,910,669,581	3,734,165,419	78.84%

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2024

2. Realisasi APBN

Selain mengelola dana dari APBD Dinas Perindustrian juga mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka – Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 1.745.475.000,- dengan Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Menengah Dan Aneka serta kegiatan Penyusunan dan evaluasi program penumbuhan dan pembangunan industri. Dari kegiatan tersebut direalisasikan sebesar Rp. 1.706.351.150,-.

Tabel 3.10 LAPORAN DATA CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DINAS PERINDUSTRIAN TAHUN 2024

No	Nama K/L Pemberi Dekon/ TP	Dasar Pelaksanaan / Pelimpahan Penugasan	Nama Program/ Kegiatan/ Rincian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Lokasi Pelaksanaan
					Kinerja	Pagu	
	Kementerian Perindustrian RI	DIPA No 019.05.3. 690765/ 2024 tanggal 28 November 2023	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka				
			Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Tugas Pembantuan				
1			Bimtek WUB Pengolahan Coklat Bagi IKM Kabupaten Lombok Utara	44,575,000	10 IKM	44,575,000	Kabupaten Lombok Utara
2			Bimtek WUB Bidang Fashion Bagi IKM Kabupaten Lombok Barat	54,575,000	10 IKM	54,575,000	Kabupaten Lombok Barat
3			Bimtek WUB Olahan Kelapa Bagi IKM Kabupaten Lombok Timur	44,565,000	10 IKM	44,345,700	Kabupaten Lombok Timur
4			Bimtek WUB Olahan Pangan Bahan Baku Singkong Bagi IKM Kabupaten Sumbawa Barat	47,965,000	10 IKM	47,865,000	Kabupaten Sumbawa Barat
5			Bimtek WUB Desainer Dan Pakaian Jadi Bagi IKM Kabupaten Sumbawa	60,255,000	10 IKM	60,255,000	Kabupaten Sumbawa
6			Bimtek WUB Pengolahan Ikan Bagi IKM Kabupaten Dompu	56,255,000	10 IKM	56,255,000	Kabupaten Dompu
7			Bimtek WUB Olahan Pangan Bagi IKM Kota Bima	60,575,000	15 IKM	60,575,000	Kota Bima
8			Bimtek WUB Olahan Pangan Bagi IKM Kabupaten Bima	50,505,000	10 IKM	50,505,000	Kabupaten Bima
9			Bimtek WUB Ekosistem permesinan Bagi IKM Kota Mataram	43,104,000	10 IKM	43,104,000	Kota Mataram
10			Bimtek WUB Kerajinan Tali Eceng Gondok Bagi IKM Kabupaten Lombok Tengah	43,995,000	10 IKM	43,995,000	Kabupaten Lombok Tengah
			IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi, dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan				
11			Pembinaan IKM OVOP Di Sentra Tenun Kota Bima	54,313,000	15 IKM	54,313,000	Kota Bima
12			Pembinaan IKM OVOP Di Sentra Tenun Kabupaten Bima	45,205,000	10 IKM	45,205,000	Kabupaten Bima
13			Pembinaan IKM OVOP Di Sentra Pewarna Alam Kabupaten Lombok Timur	44,075,000	10 IKM	43,621,199	Kabupaten Lombok Timur
14			Pembinaan IKM OVOP Di Sentra Coklat Kabupaten Lombok Utara	40,525,000	10 IKM	40,525,000	Kabupaten Lombok Utara
15			Pembinaan IKM OVOP Di Sentra Gula Aren Kabupaten Lombok Barat	33,541,000	10 IKM	32,545,000	Kabupaten Lombok Barat
16			Pembinaan IKM OVOP Di Sentra Anyaman Pandan Kabupaten Lombok Timur	38,435,000	10 IKM	38,435,000	Kabupaten Lombok Timur

17			Bimtek Manajemen Pengembangan Usaha	96,171,000	100 IKM	96,171,000	Kota Mataram
18			Bimbingan Teknis Pengembangan Produk Pengolahan Makanan Bagi IKM Kabupaten Lombok Timur	60,940,000	20 IKM	60,940,000	Kabupaten Lombok Timur
19			Bimbingan Teknis Pengembangan Produk Pengolahan Makanan Bagi IKM Kota Mataram	61,060,000	20 IKM	61,060,000	Kota Mataram

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2024

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Pembangunan di sektor industri yang dilaksanakan Dinas Perindustrian pada tahun 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Misi RPJMD dan RPD tahun 2024-2026. Indikator sasaran di bidang industri ada yang sudah tercapai dan ada belum tercapai, hal ini tentunya menjadi atensi pimpinan kedepan untuk menjadi prioritas dalam pelaksanaannya. Sumber daya manusia yang terbatas masih menjadi kendala utama dalam pencapaian indikator dan pelaksanaan program kegiatan.

Indikator kinerja pada tahun 2024 Dinas Perindustrian mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga Dinas Perindustrian Provinsi NTB pada tahun 2024 masih melakukan penyesuaian dan berbenah dengan Indikator Kinerja Utama yang dibebankan. Diharapkan untuk kedepannya setiap target dari indikator kinerja Dinas Perindustrian terus meningkat, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian Misi RPJMD NTB dan RPD tahun 2024-2026 dan juga bagi perekonomian di provinsi NTB.

Berdasarkan Capaian indikator, Dinas Perindustrian pada tahun 2024 pada indikator persentase peningkatan PAD mampu meningkatkan jumlah PAD sebesar 10,96% atau dari target sebesar Rp.90.000.000,- dengan Realisasi penerimaan PAD pada UPTD BKPD pada tahun 2024 adalah sejumlah Rp.102.936.800,- Sehingga penambahan jumlah pendapatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 adalah sejumlah Rp.10.073.575,- atau peningkatan penerimaan sebesar 10,96%. Sedangkan pada indikator Peningkatan Upah Kerja Pada Lapangan Usaha Industri Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, rata-rata upah tenaga kerja di sektor industri pengolahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan dari Rp1.888.303 pada tahun 2023 menjadi Rp1.861.737 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya pengurangan sebesar Rp26.566, yang jika dihitung secara persentase, adalah sebesar -1,40% (minus satu koma empat puluh persen).

B. Upaya/Langkah Ke Depan Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas sumberdaya manusia Dinas Perindustrian maupun pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Meningkatkan ruang lingkup kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum & HAM, Badan Sertifikasi Nasional (Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perindustrian), Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi (LSPro-Pustan) Kementerian Perindustrian, dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka standarisasi produk Industri Kecil dan Menengah melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Magang, Fasilitasi, dan lain sebagainya.
3. Meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi antar sektor dengan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten/kota terkait pencapaian Industrialisasi.

Semoga Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat, baik untuk perencanaan program dan kegiatan, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan pembangunan perindustrian untuk tahun berikutnya.